

Tugas Makalah Islamic Law
***Analisa Pengaruh Al-Qawaid Al-Ushuliyah dan Fiqqiyah Terhadap
Perbedaan Pendapat Mudharabah Dalam Fiqih Pada Kasus Bank Syariah***



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Oleh

Rahmatullah	21151200000026
Ahmad Firdaus	21151200000027

Dosen Pengampu

Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA.

Jurusan Pengkajian Islam
Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

2015

Abstract

Analysis of Effect of Al-Qawaid Al-Ushuliyah and Fiqqiyah Against Difference Opinion In Fiqh (in case of Islamic Bank/Riba). Islamic Bank is a commercial bank as defined in the Law No. 7 of 1992 on banking, which has been amended by Law No. 10 of 1998 conducting business based on sharia principles, including Islamic business units and branches of foreign banks conducting business based on sharia principles. Among the activities carried out by Islamic banks themselves are financing based on the principle of profit sharing (Mudharabah), Mudharabah according to jurists is an agreement where a person gives his wealth to others on the basis of trade in which the benefits will be divided based on the division agreed to by the parties. In the study of this paper, the differences of opinion among scholars of modern fiqh, of which there are some scholars of jurisprudence which states that the implementation of the Islamic banking system using mudaraba same as riba, and there are some states there is no element of riba, because of the terms particular that must be fulfilled by both parties. Thus, in the hope that people can understand the difference.

Keyword: *Islamic Bank, Mudharabah, Riba*

Abstrak;

Analisa Pengaruh Al-Qawaid Al-Ushuliyah dan Fiqqiyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fiqih (Kasus Bank Syariah/Riba). Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Diantaranya kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah sendiri adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), Mudharabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak. Dalam studi makalah ini, adanya perbedaan pendapat di kalangan pakar fikih modern, yang mana ada sebagian pakar fikih yang menyatakan bahwa implementasi dalam perbankan syariah yang menggunakan sistem mudharabah sama dengan riba, dan ada sebagian lagi menyatakan tidak ada unsur riba, karena adanya syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, diharapkan masyarakat bisa memahami perbedaan tersebut.

Kata kunci : *Bank Syariah, Mudharabah, Riba*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan bank-bank syariah dan lembaga keuangan Islam lainnya di Indonesia ini merupakan fenomena menarik yang kehadirannya tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor.

Pertama, kepercayaan kaum Muslimin bahwa di samping sebagai sebuah agama dalam pengertian sebuah sistem kepercayaan, Islam juga merupakan *a way of life*, jalan hidup, yang komprehensif. Islam memiliki teori politik, sistem etika, dan juga prinsip-prinsip ekonomi tersendiri.¹ Diyakini bahwa mengamalkan sistem nilai tersebut merupakan suatu tugas setiap Muslim.

Kedua, dari segi struktur penduduk, umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas sehingga wajar muncul kesadaran di kalangan umat untuk melembagakan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut termasuk di bidang muamalah.² Karena kebebasan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing dijamin pelaksanaannya dalam pasal 29 UUD 1945.

Ketiga, larangan riba merupakan ide sentral dalam ajaran ekonomi Islam sehingga bagi sebagian umat Islam yang berpegang teguh akan keidentikan bunga bank dengan riba, pada dasarnya transaksi mereka di bank-bank konvensional bukanlah merupakan cerminan nilai-nilai yang mereka anut.³ Banyak dari mereka melakukan transaksi di bank konvensional dengan alasan terpaksa karena tidak adanya pilihan lain. Bahkan masih terdapat segmen tertentu dari masyarakat yang selama ini belum atau tidak mau tersentuh oleh layanan perbankan.⁴

Keempat, *good will* dari pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam sebagai penduduk mayoritas terutama sejak masa akhir rezim Orde Baru sehingga nilai-nilai Islam mulai banyak diakomodasi dan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.⁵ Khusus untuk lembaga

¹ Ali Ausaf, *The Political Economy of The Islamic State: A Comparative Study*, (Michigan: University Microfilm Internasional, 1985), hlm. 1.

² Pada masa sekarang muncul keinginan sebagian kalangan Muslim Indonesia untuk memberlakukan kembali Piagam Jakarta yang secara tersurat menyatakan pemberlakuan Syariat Islam kepada umat Islam yang pada masa awal kemerdekaan dihapus demi menjaga kesatuan bangsa, bahkan dengan adanya otonomi daerah kini telah ada daerah yang menetapkan pemberlakuan syariat Islam di wilayahnya yaitu Aceh Nangroe Darussalam yang dimulai sejak 1 Muharam 1423 H, sedangkan beberapa daerah lain sedang mengadakan studi kelayakan penerapan syariat Islam di wilayahnya seperti Sumatra Barat dan Jawa Barat. Ratno Lukito, "Syariat Islam dalam Ruang Polisentrisitas Hukum", Kompas, Senin, 22 April 2002. Liat Nur Hidayah: *FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL ATAS ASPEK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, AL-'ADALAH Vol. X, No. 1 Januari 2011) hal.13

³ Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh BI bekerja sama dengan tiga Universitas pada tahun 2000 diperoleh kesimpulan bahwa 45% dari 4800 sampel di seluruh pulau Jawa yang diteliti berpandangan bahwa bunga bank adalah tidak sejalan dengan ajaran agama. Harisman, *Arah dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI, 2002), hlm. 1

⁴ Berdasarkan kajian yang dilakukan Bank Indonesia, terdapat sekitar 30% populasi masyarakat Indonesia yang tidak/ belum tersentuh jasa perbankan. Rudjito, *Manajemen Aplikasi Perbankan Syariah Sebuah Solusi Menuju Perbaikan Perekonomian Nasional*, (Jakarta: Economics Days UI, 2002), hlm. 1.

⁵ Pada masa sebelumnya ada beberapa aspek hukum Islam yang juga diakomodir menjadi bagian dari hukum nasional seperti UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 28/1977 tentang Perwakafan tanah Milik,

keuangan perbankan syariah, eksistensinya diakui sejak dikeluarkan UU No. 7/1992 yang mengakui keberadaan perbankan bagi hasil. UU ini disempurnakan oleh UU No. 10/1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Menurut Umar Chapra, untuk mewujudkan sistem perbankan yang Islami, peran positif negara merupakan suatu hal yang mutlak.⁶

Maka muncullah berbagai lembaga fatwa di tanah air. Keberagamaan umat Islam di Indonesia sangatlah bercorak fikih. Setiap permasalahan keagamaan dilihat dari pendekatan hukumnya, apakah haram atau halal. Berdasarkan hal tersebut pemerintah merasa perlu memperoleh legitimasi para ulama atas berbagai kebijakan yang diambilnya agar tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Karena itu kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan yang telah dicanangkan. Sebagai tindak lanjutnya, MUI mendirikan sebuah wadah di bawah naungannya yang kemudian dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kehadiran Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang menetapkan standar hukum syariah dan mengaudit operasional perbankan syariah di Indonesia dari aspek hukum syariah dapat dianggap sebagai salah satu sarana sosialisasi sekaligus aplikasi dan implementasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang muamalah.

Oleh sebab itu kami sebagai pemakalah ingin *Menganalisa Pengaruh Qawaid Fiqhiyyah Dan Ushuliyah Terhadap Perbedaan Pendapat Mudharabah Dalam Fikih Pada Kasus Bank Syariah*

B. Rumusan Masalah

1. Sejarah Bank Syariah
2. Bank Syariah Dan Mudharabahnya
3. Pendapat Para Ulama Dalam Praktik Mudharabah Pada Bank Syariah (Qawaid Al-Ushuliyah Dan Qawaid Al-Fiqiyah)

C. Tujuan Makalah

1. Mengetahui Sejarah Bank Syariah
2. Mengetahui Bank Syariah Dan Mudharabahnya
3. Mengetahui Pendapat Para Ulama Dalam Praktik Mudharabah Pada Bank Syariah (Qawaid Al-Ushuliyah Dan Qawaid Al-Fiqiyah)

UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada masa reformasi ini sedikitnya dua UU dalam wilayah ibadah yang telah disahkan dan menjadi bagian dari hukum nasional yaitu UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 38/1999 tentang Zakat.

⁶ M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwani Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sejarah Bank Syariah

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah.⁷

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasul hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya.⁸ Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut.

Seorang sahabat Rasulullah, Zubair bin al Awwam, memilih tidak menerima titipan harta. Beliau lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda: pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk memanfaatkannya; kedua, karena bentuknya pinjaman, maka ia berkewajiban mengembalikannya utuh.⁹

Sahabat lain, Ibnu Abbas tercatat melakukan pengiriman uang ke Kufah. Juga tercatat Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya Misab bin Zubair yang tinggal di Irak.

Penggunaan cek juga telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali setahun. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ra, beliau menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan cek ini kemudian mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir.¹⁰

Pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, telah dikenal sejak awal diantara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

⁷ <http://ruangdiskusi.236.n2.nabble.com/attachment/1666610/0/Sejarah%20Perbankan%20Syariah.pdf> hlm 2

⁸ Sami Hamoud, *Islamic Banking*, Arabian Information Ltd, London, 1985

⁹ Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 1996

¹⁰ Kadim Sadr, *"Money and Monetary Policies in Early Islam"*, Essay on Iqtisad, Nur Copr., Silver Spring, 1989

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja.

Pembaharuan dalam bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai "kapitalisme Islam", telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12.¹¹ Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi.

Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaissance Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis.

Bermula pada setiap bank konvensional memiliki konsep riba dan riba itu dilarang oleh ajaran Islam. Dengan konsep mereka yang seperti ini, timbul sebuah pemikiran baharu dengan membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberi jasa-jasa penyimpanan dan pemberian biaya fasilitas dengan tidak berlandaskan bunga dan beroperasi secara syariah Islam yang telah ditentukan.

Dengan konsep teoritis seperti itu bank syariah telah muncul pada tahun 1940an, namun kala itu belum dapat diwujudkan, di karenakan terdapat kendala-kendala yang belum mendukung adanya bank syariah.¹²

B. Bank Syariah dan Mudharabahnya

- Bank Syariah

Adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menurut Pasal 1 angka 13 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain :

1. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2. pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
3. prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)

¹¹ Subhi Y. Labib (1969), *Capitalism in Medieval Islam dalam The Journal of Economic History*, 29 (1), hlm. 79-96

¹² Diantara pemikir-pemikir tentang bank syariah ialah ; Anwar Qureshi (1946), Naemi Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) yang menggagas mengenai bank berdasarkan bagi hasil.

4. pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau
5. dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

- Mudharabah Bank Syariah

Mudharabah bisa juga disebut dengan qiradh yang berarti “memutuskan”. mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shohibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹³

Dibawah ini ada beberapa pendapat mengenai pengertian mudharabah secara istilah, diantaranya:

- a. *Mudharabah* menurut Abdur Rahman L. Doi yaitu :

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu (rabb al mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan yang diantara kedua belah pihak berhak memperoleh keuntungan.¹⁴

- b. *Mudharabah* menurut Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya al Mabsut mendefinisikan mudharabah yaitu :

Perkataan mudharabah diambil dari pada perkataan “*darb*” (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian mudharib berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya.¹⁵

- c. *Mudharabah* menurut ahli fiqih yaitu :

Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.¹⁶

Ditambahkan definisi dari empat Mazhab: Di antaranya menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak yang lain.¹⁷

Sementara Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang di tentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.¹⁸

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendikiawan* (Jakarta: Bank Syariah dan Tazkia Institut, 1999), Cet. I Hlm. 95

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *PERBANKAN Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, Hlm., 29

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: IKAPI, 2005), Hlm.33

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *PERBANKAN Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007, Hlm., 30

¹⁷ Ibn Abidin, *Raddal Mukhtar ala Adduril Mukhtar*, juz V (Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987) Hlm 483

¹⁸ Ad Dasuqy, *Hasyiyatuu ad Dasuqy 'alaasy syarh al-Kabir* juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hal 63

Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk di jalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.¹⁹

Sedangkan menurut Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.²⁰

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.²¹

Jadi, *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni *shohibul mal* menyediakan seluruh modal dan *mudharib*²² sebagai pengelola modal.

1. Dasar Hukum *Mudharabah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.²³ Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam memutarakan uang. Banyak orang yang memiliki modal akan tetapi tidak pandai untuk mengelola dan memproduksi uangnya, begitu pun sebaliknya sementara banyak pula yang memiliki keahlian di bidang perdagangan tetapi tidak memiliki modal. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.²⁴ Dengan demikian, akad *mudharabah* tercakup oleh dalil-dalil umum yang menghalalkan seseorang atau suatu lembaga untuk berniaga dan mencari keuntungan yang halal, serta dalil-dalil yang menghalalkan segala hal yang bermanfaat atau yang manfaatnya lebih besar dibanding *madharat*-nya.

Secara umum landasan dasar syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist-hadist berikut ini: ²⁵

a. Al-Qur'an

1) Dalam surat Al-Muzzamil ayat 20:

وَالْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

20. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;

¹⁹ Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al Nawawi, *Raudhotut Tholibin*, Juz IV (Beirut : Darul Fikr), hal 63

²⁰ Al Bahuti, *Kasysyaf al qina an matan al Iqna* juz III hal 509

²¹ fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

²² Dalam beberapa literatur fiqh, dan perekonomian Islam istilah *mudharib* dapat diinisialkan kepada pemilik modal. Jika menggunakan istilah ini, maka pengelola usahanya disebut *dharib*. Sementara dalam tulisan ini penyebutan dipastikan dengan istilah *shahibul maal* sebagai penyedia modal dan *mudharib* sebagai pengelola usaha.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet. I, hlm. 367

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. II, hlm. 176

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendikiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 135

Dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayat ini adalah kata '*yadhribun*' yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.²⁶

2) Dalam surah Al-Jumuah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

3) Dalam surah Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam (bukit Quzah di Muzdalifah). dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Dalam surat Al-Jumuah ayat 10 dan surat Al-Baqarah ayat 198 di jelaskan bahwa *mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan (*dharb*) untuk mencari karunia Allah SWT.²⁷

b. Al-Hadits

Rasulullah pernah melakukan akad *mudharabah* dengan Siti Khadijah (sebelum menikah dengannya) yang hartanya diperdagangkan di negeri Syam, atau yang seumpamanya, dan para sahabat Nabi telah sepakat menetapkan cara perdagangan seperti ini.²⁸

Hadits yang diriwayatkan oleh Shuhaib :

Artinya : “Dari Shuhaib r.a. sesungguhnya nabi saw. bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqaradhah (berbagi laba) (3) mencampurkan antara gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga bukan untuk dijualbelikan” (HR. Ibnu Majah).²⁹

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. I, hlm. 225

²⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 33

²⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini (ed.), *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa dari *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, (Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), Cet. VII, hlm. 678

²⁹ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subus As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960), Cet. IV, hlm. 76

c. Ijma'

Mudharabah telah ada sejak masa Jahiliah dan pada masa Islam tetap dibenarkan sebagai praktek. Ibnu Hajar berkata, "Yang kita pastikan adalah bahwa *mudharabah* telah ada pada masa Nabi saw. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak demikian, niscaya ia sama sekali tidak boleh."³⁰

Para sahabat banyak melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat dijadikan sebagai *ijma'*.³¹

d. Qiyas

Adapun *qiyas mudharabah* disamakan dengan *musyaaqah*.³² Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan. Selanjutnya dalam kaidah *ushul fiqh* :

"*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"³³

2. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Dalam transaksi menggunakan akad *mudharabah* masing-masing pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Hanafiah rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menyatakan maksud akad tersebut. Lafal untuk *ijab* adalah lafal *mudharabah*, *muqaradhah*, dan *muamalah* atau lafal lain yang memiliki arti demikian. Adapun lafal untuk *qabul* yang digunakan adalah: *saya ambil* (اخذت), atau *saya terima* (قبلت) atau *saya setuju* (رضيت) dan semacamnya.

Rukun *mudharabah* menurut pandangan jumhur ulama ada tiga, yaitu '*aqid* (pemilik modal) dan pengelola ('*amil/mudharib*), *ma'qud alaih* (modal, pekerjaan dan keuntungan), dan yang terakhir

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari "Fiqhus Sunnah", Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. I, hlm. 217

³¹ Al-Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al- Babi' Al-Halaby, 1357 H), Cet. I, hlm. 180

³² *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Diterbitkan kerjasama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001), hlm. 42. Lihat juga Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 16.

Musyaaqah adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang merawatnya dengan kesepakatan bahwa buahnya dibagi antara keduanya, dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan (Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, op.cit, hlm. 100)

³³ Dewan Syariah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan keputusannya (Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun 2003). Lihat: A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. I, hlm. 130

shighat (ijab dan qabul).³⁴ Rukun *mudharabah* akan sempurna jika memenuhi rukun rukun sebagai berikut:³⁵

- a) Pemodal (*shahibul maal*),
- b) Pengelola (*mudharib*),
- c) Ada usaha yang dibagihasilkan,
- d) Nisbah keuntungan
- e) Ada *ijab* dan *qabul*

b. Syarat-syarat Mudharabah

Syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut.³⁶ Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a) Syarat yang berkaitan dengan 'aqid

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Keduanya sama dengan *muwakkil* dan *wakil*, sehingga keduanya sah untuk melakukan *tasharruf*.³⁷ Diantara syarat keduanya ialah :

- 1) Pemilik modal dan pengelola ialah seorang yang merdeka dan bukan budak karena seorang budak tidak dibenarkan untuk bertransaksi kecuali dengan seizin tuannya. Sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,:

“Barang siapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka harta budak itu adalah milik penjualnya, kecuali bila pembelinya mensyaratkan agar harta tersebut menjadi miliknya.” (HR. al-Bukhary dan Muslim)³⁸

- 2) Keduanya cakap bertindak hukum secara syar'i, telah baligh, sehat akalannya dan *rasyid* (mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam hal-hal yang berguna). Hal ini sesuai perintah Allah Ta'ala :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet. I., hlm. 371

³⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 97

³⁶ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. II, hlm. 119-120

³⁷ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Moch. Anwar, dkk, dari "Fathul Mu'in", Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), Cet. I, hlm. 917

³⁸ Muhammad Arifin Badri, "Rukun-Rukun Akad Mudharabah", dalam www.PengusahaMuslim.com diakses 10 November 2015.

5. dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Qs Annisa:5)
- 3) Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberikan kuasa dan menerima pemberi kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut.³⁹
 - 4) Tidak disyaratkan aqidain harus muslim, sehingga *mudharabah* bisa dilakukan antara muslim dan *dzimmi* atau (*musta'man*) yang ada di negeri Islam.⁴⁰
- b) Syarat yang berkaitan dengan modal (*maal*)
- Modal adalah sejumlah uang⁴¹ pemilik dana yang diberikan (diserahkan) kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat modal adalah :
- 1) Modal harus dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.
 - 2) Jumlah modal harus diketahui secara pasti, hal ini bertujuan agar modal yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak.
 - 3) Modal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola (*mudharib*) secara langsung (tidak berangsur-angsur).
- c) Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- Sighat* (ucapan) adalah penawaran dan penerimaan harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Sighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :
- 1) Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan akad *mudharabah*, baik secara eksplisit maupun implisit.
 - 2) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua, karena *sighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran.

³⁹ Muhammad Konstruksi *Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm 56

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 842

⁴¹ Jumhur Ulama sepakat bahwasanya modal *mudharabah* harus berupa uang, seperti dinar, dirham (mata uang), rupiah, dolar dan sebagainya. Alasan Jumhur Ulama adalah apabila modal *mudharabah* berupa barang maka akan ada unsur penipuan (*gharar*), karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika akan dibagi, dan hal ini akan menimbulkan perselisihan di antara pemilik modal dan pengelola. Malik berkata: "Pinjaman *Qiradh* (*mudharabah*) hanya baik dalam wujud mata uang (emas dan perak), sedangkan barang-barang lain tidak pernah diperbolehkan". Lihat, Imam Malik Ibn Annas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, diterjemahkan oleh Dwi Surya Atmaja dari "Al-Muwatta' of Imam Malik Ibn Anas The First", (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1999), Cet. I, hlm. 383

- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani.

Singkat kata, tidak ada kata-kata khusus yang harus diucapkan oleh masing-masing pihak agar *mudharabah* dapat terjalin antara mereka. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* bukanlah amalan ibadah, layaknya shalat, haji, dan lain-lain. Akan tetapi, *mudharabah* adalah salah satu wujud interaksi sesama umat manusia, sehingga dapat dijalin dengan ungkapan apa saja, yang menunjukkan akan maksud dan kesepakatan kedua belah pihak, baik disampaikan secara lisan atau tulisan. Penjelasan ini didukung oleh kaidah dalam ilmu fiqih yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya : “Adat-istiadat itu memiliki kekuatan hukum”.⁴²

Yang dimaksud dengan adat-istiadat di sini ialah adat-istiadat yang telah berlaku dan dijalankan oleh setiap orang dan tidak menyelisihi syariat.

- d) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Shahibul maal memberikan modalnya kepada *mudharib* dan sebagai imbalannya ia memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, akan tetapi jika mengalami kerugian beban keseluruhan ditanggung oleh *shahibul maal*, dan *mudharib* tidak menerima apa-apa atas jasa yang telah ia kerjakan karena ia juga kehilangan keuntungan yang merupakan upahnya apabila terjadi kerugian dalam bisnis.⁴³

Nisbah (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal, keuntungan merupakan tujuan akhir dari akad *mudharabah*. Keuntungan (*nisbah*) memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada awal kontrak. Misalnya, 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% untuk pengelola.
- 3) Kalau jangka waktu *mudharabah* relatif lama tiga tahun ke atas maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.⁴⁴

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. I, hlm 33

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroya Nastangin dari “*Economic Dectrines of Islam*”, Jilid I, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995., hlm. 380-381. Beliau juga menegaskan bahwa *mudharabah* tidak dapat dilakukan tanpa membagi hasil keuntungan, karena apabila seluruh keuntungan ditetapkan untuk pemilik barang, maka kontrak itu di sebut *Bazat*: Atau tidak seluruhnya ditetapkan untuk pengelola, hal ini dianggap suatu pinjaman.

⁴⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 335

e) Syarat yang berkaitan dengan usaha (*al-‘aml*)

Usaha atau pekerjaan diharapkan dapat mewakili atau menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembangkan modal kepada penyedia dana. Syarat-syarat yang harus diterapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyedia dana tidak boleh membatasi kegiatan *mudharib*, seperti melarang *mudharib* untuk tidak sukses dalam pencarian laba.
- 2) Bentuk usaha/pekerjaan merupakan hak khusus *mudharib*, tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana, meskipun demikian madzhab Hanbali membolehkan adanya peran serta/partisipasi dari pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut.
- 3) *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik dana, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak *mudharabah* itu. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi saw :

“Dan dari Hakim bin Hizam, sahabat Rasulullah saw. “Sesungguhnya ia pernah memberi isyarat kepada seseorang, (yaitu) apabila ia memberi kepadanya harta pinjaman, maka ia menetapkan (syarat-syaratnya) : Hendaklah engkau jangan jadikan hartaku ini (untuk membeli) binatang, jangan engkau membawanya di laut, dan jangan engkau membawanya di tempat yang berair. Kemudian jika engkau lakukan salah satu dari padanya, maka berarti engkau bertanggung jawab atas hartaku itu.”(HR. Daraquthni)⁴⁵

3. Jenis-jenis Mudharabah

Pada prinsipnya *mudharabah* sifatnya mutlak. Artinya *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu, yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan atau amanah yang tinggi.⁴⁶

Prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*) :

a. *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁴⁷

Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan atau lembaga keuangan syari'ah lainnya (non bank) diaplikasikan pada tabungan dan deposito.⁴⁸

⁴⁵ A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 1833

⁴⁶ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2005), hlm. 5

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 137-138

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁴⁹

Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki dunia usaha.⁵⁰ Adapun jenis *mudharabah muqayyadah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat)

Mudharabah muqayyadah on balance sheet (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja.⁵¹

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

2) *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*

Mudharabah muqayyadah of balance sheet ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.⁵²

4. Pendapat Ulama tentang *Mudharabah*

Tidak ada perselisihan lagi di kalangan muslimin tentang kebolehan akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan *mudharabah* telah ada sejak zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam. Definisi di atas selain menjelaskan wujud *mudharabah* yang utuh, juga tersirat dimensi filosofis yang melandasinya, yaitu adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan usaha (*skill* dan *entrepreneurship*) yang dapat membuat pemodal (*shahibul maal*) dan pengusahanya (*mudharib*) berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka.⁵³ Kegiatan ekonomi ini juga lebih mengarah kepada aspek solidaritas yang tinggi dari pemilik modal untuk dapat membantu para

⁴⁸ Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. II, hlm

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Cet. I., hlm. 372

⁵⁰ Kamil Musa, *Ahkam Al-Muamalah*, (Beirut: Muasisah Ar-Risalah, 1994), Cet. II, hlm. 345

⁵¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet II, hlm. 36

⁵² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONESIA, 2004), hlm.60

⁵³ Muhammad Konstruksi *Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm.54

tenaga terampil kurang modal, karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa dihindarkan.

a. Hukum mudharabah

Dilihat dari segi hukumnya terdapat dua macam hukum *mudharabah*, yaitu:

1) Mudharabah fasid

Apabila dalam melaksanakan *mudharabah* ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka *mudharabah* tersebut dapat digolongkan menjadi *mudharabah* yang *fasid* atau rusak. *Fuqaha* sepakat bahwa hukum *mudharabah* yang rusak adalah dibatahkannya *mudharabah* itu dan dikembalikannya harta modal kepada pemiliknya selama harta itu belum habis diputar.⁵⁴

2) Mudharabah shahih

Apabila dalam melaksanakan akad *mudharabah* semua syarat dan rukun telah terpenuhi maka disebut *mudharabah shahih*. *Mudharabah* yang sah meliputi:

a) Tentang kekuasaan *mudharib*

Para *fuqaha* telah sepakat bahwa sesungguhnya yang diberi modal adalah *mudharib* sebagai wakil (pemegang amanah) bagi si pemilik modal ketika terjadi transaksi, karena semua yang ia lakukan telah mendapat izin dari pemilik modal dan itulah sebenarnya makna dari kata wakil.

Jika *mudharabah* itu dibatalkan karena beberapa sebab yang berlaku maka *mudharabah* itu dikategorikan sebagai *ijarah* dan si pelaksana sebagai penjual jasa.⁵⁵

b) Tentang berbagai usaha yang dilakukan *mudharib* dalam *mudharabah*

Tindakan hukum *mudharib* hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis *mudharabah*-nya. Jika *mudharabah* mutlak adalah akad penyerahan modal oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* tanpa menentukan jenis usaha, tempat, waktu sifat dan orang yang menjadi mitra usahanya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal menentukan jenis usaha, waktu, dan lain sebagainya.

c) Sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*

Dalam *mudharabah* ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib* kecuali ada nash yang membolehkannya, misalnya:

- *Mudharib* tidak boleh berhutang untuk menambah modal.
- *Mudharib* tidak boleh membeli barang dengan cara hutang sekalipun *shahibul maal* mengizinkannya.
- *Mudharib* tidak boleh membeli barang melebihi modal *mudharabah* baik dibayar secara langsung atau tidak, karena adanya larangan mengambil untung dari sesuatu yang tidak dimiliki.

⁵⁴ Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, II, Darul Qutub Islamiyah, hlm. 245

⁵⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:IKAPI, 2005), Hlm.238

- *Mudharib* juga tidak boleh memberikan harta pada orang lain untuk *mudharabah* atau berserikat dengannya, atau mencampurkan dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain kecuali, jika pemilik modal mengatakan “kerjakanlah menurut pendapatmu” atau ia memberi izin pada pengelolaannya.⁵⁶

d) *Mudharib* mengulang *mudharabah*nya

Pertama, madzhab Hanafi berpendapat tidak boleh bagi *mudharib* mengulang *mudharabah* harta itu dengan orang lain, kecuali diizinkan oleh pemilik harta.⁵⁷ *Kedua*, madzhab Malikiyah berkata bahwa pengelola (*amil*) adalah penjamin (*dhamin*) jika ia pinjamkan harta tanpa izin pemiliknya, artinya pelimpahannya pada yang lain untuk dikelola dan untung saat itu adalah milik pengelola kedua dan pemilik harta, tidak ada laba bagi pengelola pertama karena keuntungan pinjaman adalah bonus, tidaklah ia berhak kecuali dengan pengelolaan yang sempurna.

b. Hal-hal yang membatalkan *mudharabah*

Akad *mudharabah* akan menjadi batal atau berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Pembatalan dan larangan menggunakan modal (pencopotan modal)

Mudharabah menjadi batal dengan pembatalan, larangan menggunakan modal atau pencopotan jika terdapat syarat pembatalan atau larangan yaitu *mudharib* mengetahui pembatalan dan larangan tersebut modalnya berbentuk tunai atau tidak tunai waktu terjadinya pembatalan dan larangan tersebut.

Sedangkan, jika *mudharib* mengetahui pencopotan dan modal tadi dalam bentuk barang dagangan maka ia boleh menjualnya agar menjadi uang tunai dan ada laba. *Shahibul maal* tidak boleh melarangnya, karena itu bentuk dari pembatalan haknya ini disepakati oleh para ulama dari empat madzhab.⁵⁸

2) Meninggalnya salah seorang dari keduanya

Jika *shahibul maal* atau *mudharib* meninggal maka batal *mudharabah* itu menurut jumhur, karena *mudharabah* mencakup *wakalah*. *Wakalah* batal dengan meninggalnya orang yang mewakili atau wakilnya. *Mudharabah* itu batal, baik pekerja mengetahui kematian pemilik modal atau tidak, karena kematian adalah hukum yang menggugurkan itu tidak tergantung kepada pengetahuan sebagaimana dalam *wakalah*.

Malikiyah berpendapat bahwa tidak batal *mudharabah* dengan meninggalnya salah seorang dari keduanya dan ahli waris pemilik harta melanjutkan *mudharabah* tersebut jika mereka orang-orang yang dipercaya.⁵⁹

⁵⁶ Wiroso, *Ibid.*, Hlm 243

⁵⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), Cet. II, hlm. 424

⁵⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: IKAPI, 2005, Hlm 260

⁵⁹ Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, II, Darul Qutub Islamiyah, hlm. 240

- 3) Salah seorang dari mereka berdua jadi gila

Mudharabah batal karena gila membatalkan kemampuan untuk melakukan muamalat dan setiap yang membatalkan *wakalah* juga membatalkan *mudharabah*, seperti pingsan dan larangan terhadap pemilik modal. Adapun larangan terhadap pekerja karena bodoh maka ia tidak dicopot menurut Hanafiyah, karena ia seperti anak-anak yang *mumayyiz* dan *mumayyiz* boleh menerima *wakalah* dari orang lain. Demikian juga dengan orang yang bodoh.

- 4) Pemilik modal jadi *murtad*

Jika *shahibul maal* dibunuh karena *murtad* atau ikut perang dan hakim menguatkan keikutsertaannya itu, maka *mudharabah* batal di hari murtadnya itu menurut Abu Hanifah, karena ikut ke medan perang sama dengan mati, dan mati menyebabkan hilangnya kemampuan pemilik modal.

Kalau pekerja *murtad* maka *mudharabah* tetap berlangsung, karena adanya kemampuan pemilik modal walaupun pekerja telah membeli dan menjual serta mendapatkan laba, kemudian ia dibunuh karena *murtad* atau meninggal atau ikut ke medan perang maka seluruh yang telah ia lakukan hukumnya boleh dan laba dibagi untuk keduanya, sebagaimana yang disepakati karena pekerjaan orang yang *murtad* sah karena ia adalah manusia yang bisa membedakan (*mumayyiz*) tanpa ada kekurangan padanya.

- 5) Hancurnya harta *mudharabah* di tangan pekerja

Mudharib lalai dalam memelihara harta, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan diadakannya akad. Dalam kondisi yang semacam ini maka akad *mudharabah* batal. Demikian juga *mudharabah* batal jika pekerja menghancurkan modal atau menginfakkannya atau diserahkan kepada orang lain lalu dihancurkannya sehingga pekerja tidak berhak membeli sesuatu modal untuk *mudharabah*.⁶⁰

C. Pendapat Para Ulama Dalam Praktik Mudharabah Pada Bank Syariah (Qawaid al-Ushuliyah dan Qawaid al-Fiqiyah)

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah biasanya tidak lepas dari penggunaan sistem bagi hasil (*mudharabah*) baik dari sistem pengumpulan maupun penyaluran. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Mudharabah* pada bank syariah biasanya di pergunakan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Diantaranya *mudharabah* dari segi pendanaan; yaitu tabungan berjangka, deposito biasa, deposito spesial (*special investment*). Sedangkan *Mudharabah* dari segi pembiayaan; yaitu pada sektor pembiayaan modal, dan investasi dana.

Dalam pengoperasian produk *mudharabah*, berbagi keuntungan dan kerugian antara pemodal dan pengusaha/pengelola butuh adanya transparasi dan kejujuran yang tinggi antara kedua belah pihak.

⁶⁰ Wiroso, *Ibid.*, Hlm 260

Baground utama dari bank syariah, yaitu pelanggaran bunga bank, karena bunga bank termasuk kategori riba, sedangkan riba dalam syariat islam dilarang, adanya sistem kontrak yang adil dan pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip syara' dan telah di sepakati sebelumnya (di waktu akad/ijab-qobul).

Akan tetapi pada perkembangan Bank Syariah terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya. Ada beberapa pendapat yang menyudut pandangan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional pada umumnya, diantaranya pendapat-pendapat pakar fikih terhadap kasus bank syariah;

- a. Menurut Zaimi Saidi; bahwa perbankan syariah terdapat unsur kepentingan yang sangat jelas (dalam konteks perselingkuhan) yang terjadi pada posisi bersamaan, yakni bertindak sebagai sahib al-maal dan mudharib. Dimana ketika bank syariah menghimpun uang dari nasabah, ia menyatakan dirinya sebagai mudarib, tetapi ketika ia menyalurkan dana tersebut, ia merubah posisinya sebagai shahib al-maal. Disini terlihat bahwa ada kesalah teknis dalam menggunakan harta tersebut, yakni titipan merupakan amanah, sedangkan pada pihak yang dititipi tidak berhak menggunakan uang (harta) tersebut, baik dipakai oleh diri sendiri maupun dipinjamkan oleh orang lain. Dengan demikian, pihak kedua (mudharib) tidak boleh beralih menjadi shahib al-maal, yang menggunakan dana nasabah. Karena praktik tersebut mengandung zulm, gharar, dan unsur ketidakadilan. Maka dalam praktik tersebut di bank syariah sama statusnya dengan riba.
- b. Sedangkan menurut Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A, CHC. Mengatakan hal yang demikian – dikatakan oleh zaimi saidi- tidak langsung menjadi mudharib (pengelola dana) dan shahib al-maal (pemilik modal) sekaligus, akan tetapi bank syariah yang menjadi mudharib dan melakukan berbagai macam usaha dengan pihak lain itu tidak melapaskan perizinan (persetujuan) dari nasabah pemilik modal (shahib al-maal). Dan bank syariah tersebut hanyalah sebagai perantara antara nasabah surplus unit dengan nasabah defisit unit. Dengan syarat jaminan yang diberikan oleh mudharib kepada bank syariah, hanyalah sebagai bentuk untuk menghindari kelalaian/penyelewengan.

Adapun 'ilatnya sebagai sumber al-qowaid al-fiqiyah dan ushuliyah, sebagai berikut;

المسلمون عند شرطهم

"Orang-orang islam sesuai dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan"

الأصل في الأشياء الحلّ إلا أن يكون فيه مضرة

"Pada dasarnya segala-sesuatu halal (boleh) dilaksanakan, kecuali ada madharat (bahaya) dalam pelaksanaannya"

الغرم بالغنم

"Kerugian dengan keuntungan (dtanggung dan dibagi bersama)"

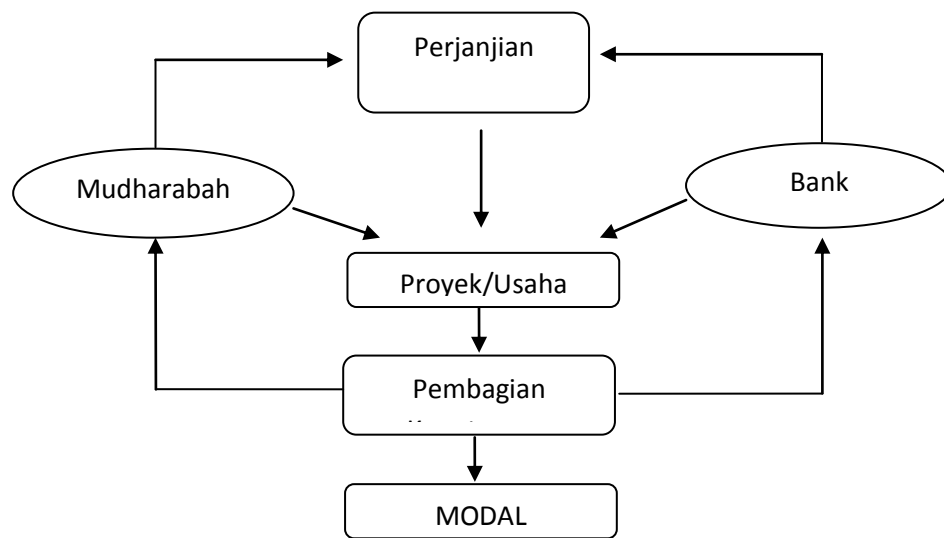
الأصل في المنافع الحلّ وفي المضارّ التحريم

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal (boleh) dilaksanakan dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan”

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”

Skema perbankan syariah dalam praktik mudharabah.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank Syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah pun memiliki kegiatan yang berfungsi sebagai berikut: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) ataudengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Hal tersebut merupakan kegiatan yang melalui unsur kesepakatan kedua belah pihak, yang dilandasi aturan-aturan yang berlaku diantaranya yaitu syarat-syarat, dan rukun-rukun dalam mudharabah perbankan.

Dari makalah yang penulis buat ini, ada sebagian pendapat yang menyalahi aturan dalam civitas perbankan syariah, yakni dalam melakukan mudharabahnya ada unsur ketidak jelasan dalam praktik akad, dan hal tersebut akan menimbulkan unsur gharar, zhulm, dan riba, dan sebagian pendapat lainnya dalam civitas perbankan murni tidak menemukan kecacatan hanya saja dalam proses akadnyaharus berlandaskan ridho dengan ridho.

B. Saran

Demikian makalah yang dapat penulis buat, semoga mendapatkan manfaat serta menambah hasanah pengetahuan dan wawsasan bagi pembaca. Tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan sehingga makalah ini menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al Nawawi, *Raudhotut Tholibin, Juz IV*, Beirut : Darul Fikr.
- Ad Dasuqy, *Hasyiyatuu ad Dasuqy 'alaasy syarh al-Kabir juz III*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al Bahuti, Kasysyaf al qina an matan al Iqna juz III.
- Ali Ausaf, *The Political Economy of The Islamic State: A Comparative Study*, Michigan: University Microfilm Internasional, 1985.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, 1994. *Terjemahan Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Moch. Anwar, dkk, dari "Fathul Mu'in", Jilid I, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Fikri, 1357 H. *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad (ed.), 2007. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa dari *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Cet. 7. Surabaya: CV. Bina Iman,
- Antonio, M. Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani,
- _____, 1999, *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute,
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, Cet. 2 Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Ausaf, Ali, 1985. *The Political Economy of The Islamic State: A Comparative Study*, Michigan: University Microfilm Internasional
- Azwar, Adiwarman Karim, 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Badri, Muhammad Arifin, "Rukun-Rukun Akad Mudharabah", dalam www.PengusahaMuslim.com diakses 10 November 2015.
- Dewi, Gemala, 2005. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamoud, Sami 1985. *Islamic Banking*, Arabian Information Ltd, London.
- Harisman, 2002. *Arah dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Biro Perbankan Syariah BI.
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbi, Muhammad Ash Shiddieqy, 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Hassan, A. Qadir dkk, 1987. *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu,

- Hidayah, Nur, 2011. *FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL ATAS ASPEK HUKUM ISLAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 1)
- Ibn Annas, Imam Malik, 1999. *Al-Muwatta’ Imam Malik Ibn Anas*, diterjemahkan oleh Dwi Surya Atmaja dari “Al-Muwatta” of Imam Malik Ibn Anas The First”, Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ibn Abidin, *Raddal Mukhtar ala Adduril Mukhtar*, Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987.
- Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, II, Darul Qutub Islamiyah.
- Karim, Adiwarman, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lukito, Ratno, 2002. “Syariat Islam dalam Ruang Polisentrisitas Hukum”, Kompas, Senin, 22 April.
- Muhammad, 2003. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah: Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam
- Musa, Kamil, 1994. *Ahkam Al-Muamalah*, Beirut: Muasisah Ar-Risalah.
- Rahman, Afzalur, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroya Nastangin dari “Economic Dectrines of Islam”, Jilid I, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Rudjito, *Manajemen Aplikasi Perbankan Syrariah Sebuah Solusi Menuju Perbaikan Perekonomian Nasional*, Jakarta: Economics Days UI, 2002.
- Remy, Sutan Sjahdeini, 2007. *PERBANKAN Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sabiq, Sayyid, 2006. *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “Fiqhus Sunnah”, Jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sadr, Kadim, 1989. “Money and Monetary Policies in Early Islam”, Essay on Iqtisad, Nur Copr., Silver Spring.
- Syakir, Muhammad Sula, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- Subhi Y. Labib, 2002. Capitalism in Medieval Islam dalam The Journal of Economic History, 29 (1).
- Sudarsono, Heri, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONESIA Sudin Haron, 1996. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publishing Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
- Sumitro, Warkum, 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Bamui & Takaful Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumiyanto, Ahmad, 2005. *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari’ah Mikro Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: Megistra Insania Press.
- Taqiyuddin, Imam Abubakar Bin Muhammad Alhusaini (ed.), 2007. *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shaleh)*, diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa dari *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, Surabaya: CV. Bina Iman.

Umer M. Chapra, 2000. *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press.

Zahrah Abû, 1994. *Ushûl al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Wardi, Ahmad Muslich, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH.

Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: IKAPI, 2005.

Dewan Syariah Nasional (DSN), 2003. Himpunan Fatwa DSN Edisi Kedua Tahun.

fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Diterbitkan kerjasama antara DSN MUI dengan Bank Indonesia, 2001. .

<http://ruangdiskusi.236.n2.nabble.com/attachment/1666610/0/Sejarah%20Perbankan%20Syariah.pdf>